



## **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF PADA MASA SOEKARNO TAHUN 1945–1965**

### **Indonesia's Independent and Active Foreign Policy during the Soekarno Era (1945–1965)**

Farah Zahidah Setiawan  
Eko Ribawati

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[2288230023@untirta.ac.id](mailto:2288230023@untirta.ac.id)

[eko.ribawati@untirta.ac.id](mailto:eko.ribawati@untirta.ac.id)

**ABSTRAK:** Penelitian ini mempertimbangkan prinsip Bebas-Aktif dalam politik luar negeri Indonesia selama pemerintahan Soekarno (1945–1965). Ide ini muncul sebagai tanggapan terhadap keadaan global setelah Perang Dunia II dan polarisasi Perang Dingin. Prinsip ini berasal dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang menekankan keadilan sosial dan perdamaian abadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari latar belakang pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri Bebas-Aktif. Selain itu, penelitian ini juga akan menyelidiki kesulitan dan dampak pemikiran geopolitik Soekarno terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Metode kualitatif historis digunakan dalam penelitian ini. Ini melibatkan analisis sumber tertulis seperti dokumen resmi, pidato, dan literatur ilmiah. Studi menunjukkan bahwa prinsip bebas-aktif dipromosikan oleh Konferensi Asia-Afrika (1955) dan Gerakan Non-Blok (1961), memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor negara-negara berkembang. Namun, masalah domestik dan internasional disebabkan oleh kebijakan konfrontatif terhadap Malaysia dari 1963 hingga 1966 dan orientasi geopolitik yang condong ke Timur. Meskipun demikian, diplomasi Soekarno terus memengaruhi politik luar negeri Indonesia saat ini.

**Kata kunci:** Bebas-Aktif, Diplomasi, Geopolitik, Soekarno, Politik Luar Negeri

**ABSTRACT:** This study considers the Free and Active principle in Indonesia's foreign policy during the Soekarno administration (1945–1965). This idea emerged in response to the global situation after World War II and the polarization of the Cold War. This principle stems from Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution, which emphasize social justice and lasting peace. The purpose of this study is to examine the background of the formation and implementation of Free and Active foreign policy. In addition, this study will also investigate the difficulties and impact of Soekarno's geopolitical thinking on Indonesia's foreign policy. A historical qualitative method is used in this study. This involves the analysis of written sources such as official documents, speeches, and scientific literature. The study shows that the principle of free and active was promoted by the Asian-African Conference (1955) and the Non-Aligned Movement (1961), strengthening Indonesia's position as a pioneer of developing countries. However, domestic and international problems were caused by the confrontational policy towards Malaysia from 1963 to 1966 and the geopolitical orientation leaning towards the East. Nevertheless, Soekarno's diplomacy continues to influence Indonesia's current foreign policy.

**Keywords:** Free and Active, Diplomacy, Geopolitics, Soekarno, Foreign Policy

#### **LATAR BELAKANG**

Strategi dan tindakan yang diambil oleh para pengambil keputusan suatu negara

untuk berinteraksi dengan pihak-pihak di tingkat internasional untuk mencapai

kepentingan dan tujuan negara tersebut dikenal sebagai politik luar negeri. Ini diungkapkan oleh Holsti, yang menyoroti peran ide dan komponen pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah dan mengedepankan perubahan situasi. Ini ditunjukkan oleh kebijakan, sikap, dan tindakan suatu negara. Untuk memperkuat perannya di kancah internasional, pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai "bebas-aktif", yang bertujuan untuk melakukan kerja sama ekonomi dan mempromosikan perdamaian tanpa memihak pada blok politik tertentu. Melalui keterlibatan dalam Gerakan Non-Blok, yang berusaha menghapus kolonialisme dan mendukung upaya perdamaian di seluruh dunia,

Prinsip Bebas-Aktif mencerminkan kebebasan dalam menentukan sikap tanpa dipengaruhi oleh tekanan ideologis tertentu, sementara kata "aktif" menunjukkan partisipasi aktif Indonesia dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Prinsip ini didasarkan pada tiga hal utama, yaitu: ideologi Pancasila sebagai dasar nilai, konstitusi dari Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta garis besar kebijakan luar negeri yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (Indrawati & Nugroho, 2019). Selain itu, Pasal 11 UUD 1945 dan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga memperkuat prinsip Bebas-Aktif sebagai pedoman dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Setiap negara yang merdeka menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan dunia internasional. Pada masa Soekarno (1945–1965), Indonesia menghadapi situasi setelah kemerdekaan, di mana perang dingin antara Blok Barat dan Timur menjadi tantangan besar.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang lahirnya dan implementasi politik luar negeri Bebas-Aktif di masa pemerintahan Soekarno, beserta tantangan dan pengaruh pemikiran geopolitik Soekarno. Metode yang digunakan adalah analisis historis kualitatif dari sumber tambahan, seperti pidato, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Dua subtopik utama menjadi pusat pembicaraan: (1) Latar Belakang Lahirnya dan Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia pada Masa Soekarno (1945–1965) dan (2) Tantangan dan Pengaruh Pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Hasil ini penting untuk memahami perkembangan diplomasi Indonesia saat ini.

## **METODA**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan metode sejarah untuk mengkaji secara mendalam kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bersifat Bebas-Aktif pada masa pemerintahan Soekarno (1945–1965). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian merupakan peristiwa dan kebijakan masa lalu yang perlu dipahami secara kontekstual, naratif, dan kronologis melalui sumber-sumber sejarah, bukan melalui data statistik atau survei. Metode sejarah diterapkan melalui empat tahap utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber) dengan menghimpun dokumen resmi pemerintah, pidato tokoh, arsip sejarah, buku akademik, jurnal ilmiah, dan sumber daring yang kredibel; verifikasi atau kritik sumber untuk menilai keaslian dan keabsahan isi data; interpretasi fakta sejarah dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik, ideologi Pancasila, dinamika Perang Dingin, serta geopolitik global; dan historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian secara sistematis dan kronologis. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah studi literatur karena data yang dibutuhkan berupa sumber tertulis dan dokumen historis. Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah dan fokus penelitian, pengumpulan data sekunder, evaluasi dan kritik sumber, analisis data secara kualitatif, serta penyusunan laporan penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang analitis dan argumentatif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung oleh lembar catatan data untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema, waktu, dan relevansinya dengan topik penelitian, sehingga memungkinkan penafsiran data yang mendalam dan bermakna.

## PEMBAHASAN

### **Latar Belakang Lahirnya dan Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia pada Masa Soekarno (1945–1965)**

Dalam pidatonya di Inter-Asia Relations Conference di New Delhi pada tahun 1947, Sutan Sjahrir mendeklarasikan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia untuk pertama kalinya, di mana ia menolak paksaan memilih antara Blok Anglo-Saxon dan Soviet Rusia: "Dunia tampaknya telah memaksa kita untuk membuat pilihan kekuatan besar yang saling bermusuhan... tetapi kita menolak untuk dipaksa... kita tidak ingin terperangkap dengan sistem yang tidak cocok dengan sistem yang kita miliki" (Deplu, 1996).

Pernyataan ini mencerminkan situasi setelah kemerdekaan, ketika negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan menghadapi tekanan dari dua kekuatan utama. Pidato Mohammad Hatta mendukung gagasan ini "Mendayung di antara Dua Karang" pada tahun 1948, yang berasal dari konflik antara Blok Barat dan Timur, menekankan netralitas aktif, yang sesuai dengan kepribadian negara Pancasila. Mochtar Kusumaatmadja

(1983) mengatakan bahwa "bebas" berarti tidak memihak kekuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan "aktif" berarti menghindari sikap pasif atau reaktif terhadap masalah global. Dimulai pada Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, Indonesia memainkan peran penting dalam Gerakan Non-Blok (GNB). Gerakan ini dideklarasikan pada KTT Beograd pada tahun 1961 bersama India (Nehru), Yugoslavia, Mesir, dan Ghana. Tujuan GNB adalah untuk menciptakan perdamaian global tanpa memihak Blok Barat atau Timur. GNB juga menentang imperialisme, neokolonialisme, rasisme, dan Zionisme, serta mendorong kerjasama damai antara negara-negara merdeka (Wuryanto, 2017; Natasya, 2003; Akbar et al., 2020).

Indonesia berpartisipasi aktif dalam persiapan KTT Beograd, selaras dengan Pembukaan UUD 1945 (alinea pertama), yang menekankan penghapusan penjajahan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip GNB adalah Bebas-Aktif, yang berarti perdamaian dapat dicapai tanpa pakta militer, yang mendorong keterlibatan ini. Hubungan dengan Malaysia adalah contoh implementasi bilateral, karena kedua negara memiliki hubungan erat sebagai rumpun bangsa dengan persamaan budaya, etnis, dan wilayah yang mendukung kerjasama ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Namun, prinsip ini diuji dalam perselisihan Sabah dan Sarawak dari 1963 hingga 1966. Pembentukan Federasi Malaysia, yang dianggap sebagai neokolonialisme Inggris, menimbulkan konflik. Strategi Indonesia adalah diplomasi perundingan damai. Ini terbukti dalam pertemuan Tokyo (Mei 1963) antara Soekarno dan Tunku Abdul Rahman, sidang internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Konferensi Manila (Juli–Agustus 1963), yang menghasilkan Deklarasi Manila,

Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama.

Pada Januari 1963, Soekarno secara resmi menolak ekspansionisme Federasi Malaysia, dan Subandrio, Menteri Luar Negeri, mengumumkan kebijakan konfrontasi pada 20 Januari 1963. Konferensi Manila (Juli–Agustus 1963), yang menghasilkan Deklarasi, Persetujuan, dan Komunike Manila (Usman, 2019), dan pertemuan Tokyo (Mei 1963) antara Soekarno dan Tunku Abdul Rahman, yang tidak mencapai kesepakatan penuh. Pada awalnya, Indonesia mendukung Federasi untuk menghindari citra ekspansionis, seperti yang ditunjukkan oleh surat Subandrio ke New York Times pada 17 November 1961. Selama konfrontasi dengan lawan isolasi, Indonesia mendekati diri ke Blok Timur melalui hubungan diplomatik dengan China (1950).

Patriotisme pascakolonial, fokus pengakuan internasional, dan hubungan diplomatik memengaruhi kebijakan Orde Lama. Meskipun Indonesia menunjukkan sikap konfrontatif anti-kolonial, seperti pembebasan Irian Barat dan KAA yang mendorong persatuan Asia-Afrika, Indonesia tetap netral antara AS dan Uni Soviet. Hal ini menyebabkan peningkatan keanggotaan PBB dari 12 negara pada tahun 1945) menjadi 53 negara pada tahun 1960, dan membentuk blok Afro-Asia-Amerika Latin sebagai alternatif anti-kolonial (Weinstein, 2007).

### **Tantangan dan Pengaruh Pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif**

Berdasarkan pemikiran geopolitik Soekarno, Bebas-Aktif dengan Pancasila sebagai jalan tengah ideologis, yang menekankan kemanusiaan adil dan beradab sebagai strategi keluar dari konflik Blok Barat-Timur. Presiden Soekarno menyatakan: "Internasionalisme tidak dapat tumbuh subur, kalau tidak berakar

dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat tumbuh subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya Internasionalisme." Setelah dimasukkan ke dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1960, Pancasila menjadi titik temu ideologi global: "Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu... sesuatu itu kami namakan Pancasila... dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri." Di KAA, diplomasi didasarkan pada prinsip-prinsip seperti musyawarah, ketuhanan, kemanusiaan, internasionalisme, dan keadilan sosial.

Salah satu masalah utama adalah dinamika Perang Dingin setelah PD II, ketika negara-negara berusaha untuk membentuk aliansi blok. Ini menyebabkan konflik di dalam negeri Indonesia antara kelompok kiri yang mendukung Timur dan kelompok kanan yang mendukung Barat. Pasca-kemerdekaan, agresi Belanda (1945–1949) menimbulkan dilema: Sjahrir dan Hatta memilih netralitas tengah, sementara kelompok kiri mendorong aliansi komunis anti-Barat (Legge, 1972). Karena pembentukan sistem kebijakan baru, ujian posisi Indonesia dalam sistem internasional, keinginan untuk memiliki pengaruh blok menjadi lebih sulit. Soekarno berpikir bahwa Asia-Pasifik akan menjadi pusat dunia baru yang tidak terpengaruh oleh imperialisme: "Asia Pasifik akan jadi pusatnya dunia!... Eropa hanya jadi benua tua yang sakit-sakitan" (karya tahun 1930-an). Ini melahirkan KAA (1955) dan GNB sebagai "capital geopolitical", memobilisasi antikolonial (Bourdieu) (Haryanto, 2014).

Pentingnya kritik polarisasi dalam pidato PBB tahun 1960 terbukti: "Maafkan Lord Russell... tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat Asia dan Afrika yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of American Independence.". Konferensi Tri-Kontinental, perjuangan untuk

membebasan Irian Barat, perjuangan untuk kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika (Maroko, Tunisia, Aljazair, Sudan), dan Pancasila sebagai sumber daya dunia baru. KAA menuntut representasi adil di Dewan Keamanan, penolakan bantuan penjajah, dan universalisasi PBB. GNB (1961) menunjukkan pengabdian aktif daripada netralitas pasif: "Non-Blok adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur kemerdekaan... berpegang teguh pada perdamaian, keadilan sosial dan kebebasan" (pidato Soekarno, KTT Beograd). GNB menentang apartheid, mendukung Palestina, dan menentang kolonialisme di Asia-Afrika-Amerika Latin. Soekarno diberi gelar karena pendirian anti-kolonialnya "Pendekar Pembebas Bangsa Islam" (Konferensi Islam Asia-Afrika, 1965).

Namun, saat transisi ke arah Timur, masalah muncul. "Poros Jakarta-Peking-Pyongyang" dan nasakom, yang merupakan organisasi nasional-sosial-komunis, menimbulkan kontroversi dan mengurangi netralitas (Weinstein, 2007). Keluar PBB (1965) tolak dominasi Barat, tapi isolasi ekonomi lemahkan posisi. Setelah Perang Dingin, GNB mempertimbangkan masalah baru seperti pembangunan, ekonomi, lingkungan, dan kemiskinan pada tahun 1990-an.

### **Implikasi Latar Belakang Lahirnya dan Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia pada Masa Soekarno (1945–1965)**

Sebagaimana disajikan dalam hasil penelitian, latar belakang lahirnya prinsip Bebas-Aktif melalui pidato Sjahrir (1947) dan Hatta (1948) menunjukkan perubahan awal terhadap Perang Dingin, di mana netralitas menjadi strategi untuk bertahan setelah kolonialisme. Implementasi melalui KAA (1955) dan GNB (1961) bukan hanya simbolis; mereka juga membentuk jaringan anti-imperialisme di seluruh dunia, meningkatkan peran Indonesia sebagai

mediator negara berkembang. Misalnya, konfrontasi Malaysia 1963–1966 menguji prinsip "aktif" melalui diplomasi PBB dan Manila, meskipun pada awalnya mendukung Federasi untuk menghindari citra ekspansionis (surat Subandrio, 1961). Hubungan China (1950) memperkuat posisi anti-isolasi, tetapi fleksibel terhadap kepentingan nasional.

Implikasi utama adalah dengan GNB sebagai konsekuensi logis dari Free-Active, efek utama adalah peningkatan persepsi Indonesia sebagai pendukung perdamaian (Sunario; Adam Malik, 1966; Ali Alatas). Namun, Orde Lama seringkali "keras" dan agresif, dimotivasi oleh nasionalisme, yang menghasilkan persatuan Asia-Afrika tetapi memicu ketegangan ekonomi di dalam negeri. Transisi ke Soeharto (1966) lebih pragmatis, mencari investasi Barat tanpa retorika, mengadaptasi dinamika global yang stabilkan kebijakan tetapi kurang aspek ideologis, dan mengadopsi investasi Barat tanpa retorika.

### **Analisis Tantangan dan Pengaruh Pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif**

Membangun dari temuan hasil penelitian, pemikiran geopolitik Soekarno memiliki pengaruh yang visioner; Pancasila digambarkan sebagai universalisme-humanisme yang seimbang dengan nasionalisme-internasionalisme dan anti-imperialisme. Ini mendorong KAA-GNB untuk menjadi kapital geopolitik dan mengubah posisi Indonesia dari marginal ke strategis melalui pelatihan diplomasi global. Dilema seperti agresi Belanda dan konflik internal adalah contoh dari tantangan bipolar dunia (blok Barat-Timur). Namun, Soekarno menggunakan Pancasila sebagai jalan tengah yang realistis, menghindari condong penuh meskipun ada "poros Timur" sementara. Pengaruh ini mendorong Bebas-Aktif sebagai alternatif geopolitik, tetapi masalah

seperti isolasi (keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan ekonomi yang tidak stabil menunjukkan batas idealisme. Secara keseluruhan, gagasan Soekarno memiliki sifat fleksibel, dan GNB berkembang menjadi masalah modern seperti pembangunan dan iklim, yang relevan untuk diplomasi Indonesia saat ini.

Tabel 1. (Judul tabel yang Anda cantumkan)

No.	Data	Data
1.	Yumetri Abidin, 2019, Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia	Kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain demi kepentingan negara, dipengaruhi oleh faktor dalam negeri dan luar negeri, dikenal sebagai politik luar negeri. Bab I: Introspeksi ke Politik Luar Negeri Indonesia
2.	Agus Haryanto & Isman Pasha, 2016, Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek	Peran Indonesia dalam diplomasi luar negeri bebas dan aktif, seperti yang ditunjukkan oleh peran Indonesia di Konferensi Asia-Afrika (1955) dan Gerakan Non-Blok (1961) adalah contoh simbol diplomasi bebas.
3.	Hasto Kristiyanto, 2023, Geopolitik Bung Karno: Progressive Geopolitical Coexistence	Pemikiran geopolitik Bung Karno menempatkan Indonesia sebagai pemimpin perdamaian dunia dan menentang kolonialisme dan imperialisme. Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia-Afrika menunjukkan aktualisasi geopolitik progresif Soekarno.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis historis terhadap temuan penelitian, politik luar negeri Bebas-Aktif Indonesia pada masa Soekarno (1945–1965) muncul sebagai respons adaptif terhadap polarisasi Perang Dingin. Ini dimulai dengan pidato Sutan Sjahrir pada 1947 yang menentang paksaan aliansi blok besar, dan diperkuat oleh Mohammad Hatta pada 1948 sebagai netralitas aktif yang berbasis Pancasila. Dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 dan Gerakan Non-Blok (GNB) 1961, Indonesia menjadi pionir dalam membangun jaringan anti-imperialisme global dan meningkatkan pengakuan internasional, termasuk pembebasan Irian Barat dan perluasan keanggotaan PBB menjadi 53 negara setelah 1960. Namun, konfrontasi Malaysia 1963–1966 menjadi ujian nyata; diplomasi perundingan seperti Konferensi Manila dan sidang PBB gagal mencegah ketegangan sepenuhnya, meskipun awalnya didukung untuk menghindari citra ekspansionis, menunjukkan fleksibilitas prinsip Bebas-Aktif dalam menghadapi neokolonialisme di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, dalam pidato tahun 1960 di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Soekarno mengkritik polarisasi blok dan memposisikan Asia-Pasifik sebagai pusat dunia baru bebas imperialisme, menunjukkan pemikiran geopolitik Soekarno yang visioner, yang menggambarkan Pancasila sebagai ideologi tengah yang menggabungkan nasionalisme dan internasionalisme. Pengaruh ini mendorong gerakan anti-kolonial melalui KAA dan GNB, yang tidak hanya netral tetapi aktif mendukung perdamaian, keadilan sosial, dan pembebasan negara seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair, hingga Soekarno diakui sebagai "Pendekar Pembebas Bangsa Islam" pada tahun 1965. Tantangan utama, seperti konflik di dalam negeri antara kelompok pro-Timur dan pro-Barat akibat agresi Belanda dari 1945

hingga 1949, dan orientasi ke Blok Timur melalui gagasan nasakom dan "poros Jakarta-Peking-Pyongyang", mengurangi efektivitas netralitas dan menyebabkan isolasi ekonomi setelah PBB keluar pada tahun 1965.

Secara keseluruhan, hasil ini mengkonfirmasi bahwa Bebas-Aktif bukan hanya strategi bertahan pasca-kolonial, tetapi juga instrumen geopolitik yang mengubah posisi Indonesia dari marginal menjadi mediator strategis di arena global. Meskipun demikian, langkah-langkah ini dibatasi oleh idealisme konfrontatif yang menyebabkan ketegangan di dalam negeri. Warisan ini masih relevan dalam diplomasi modern Indonesia; GNB muncul untuk menangani masalah kemiskinan, pembangunan, dan lingkungan setelah Perang Dingin, menekankan adaptasi ideologis Pancasila terhadap dinamika internasional multipolar.

## PUSTAKA ACUAN

- Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*.
- Akbar, T. H., Subagyo, A., & Oktaviani, J. (2020). Realisme Dalam Kepentingan Nasional Indonesia Melalui Forum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Dinamika Global*, 5(1): 123-139.
- Darmawan. (2005). *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*. Bandung: CV Hikayat Dunia.
- Deplu. (1996). *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: buku III Periode 1960-1965*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 4(2): 17-27.
- Dwi Kurniawan, F., Prawira, R., Fatahillah Eleizar, A., & Mutiara Ridwan, V. (2023). Pengaruh Prinsip Bebas-Aktif Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus BRICS. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 356–362. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Efantino F, Arifin Sn. (2009). *Gayang Malaysia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.
- Haryanto, A., & Pasha, I. (2016). *Diplomasi Indonesia realitas dan prospek*.
- Hasto Kristiyanto. (2023). *Geopolitik Bung Karno Progressive Geopolitical Coexistence* (Vol. 1).
- Indrawati, & Nugroho, A. Y. (2018). Penerapan Prinsip Politik luar negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim. *Verity Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 10(20): 14-26.
- Katon, Baiq Giri Sekar. 2019. *Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2014). *Gerakan Non-Blok (GNB)*. Retrieved Juli 15, 2021, from [https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman\\_list\\_lainnya/gerakan-non-blok-gnb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman_list_lainnya/gerakan-non-blok-gnb).
- Kusumaatmadja, M. (1983). *Politik luar negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. Bandung: Alumnus.
- Legge, J. D. (1972). *Sukarno Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maksum, Ali. (2017). *Menyingkap Tabir Hubungan Indonesia Malaysia: Menguak Fakta Dibalik Berbagai Sengketa Dua Negara*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Muttaqien, M., & Dharmaputra, R. (2013). *Dinamika Politik luar negeri Indonesia: Sebuah Analisis Kontemporer*. Surabaya: Cakra Studio Global Strategis.
- Natasya, N. (2003). *Gerakan Non-Blok dalam Masa Kepemimpinan Indonesia 1992-1995*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Nur, C., & Ravico, R. (2021). *GANYANG MALAYSIA Studi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966*. *Danadyaksa Historica*,

- 1(1), 25.  
<https://doi.org/10.32502/jdh.v1i1.3594>
- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). Dinamika kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia melalui gerakan Non-Blok. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 13–28. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/422/293>
- Sejarah Diplomasia Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa. 1966. Departemen Luar Negeri.
- Setyowati, A. (2023). Perkembangan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(4), 779–784. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i4.4812>
- Siswanto, Ganewati Wuryandari, Mario Surya Ramadhan, Nanto Sriyanto, & R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas. (2024). Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok. In *Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok*. <https://doi.org/10.55981/brin.758>
- Sunarti, Linda. (2014). Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia, 1957-1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama. *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 2(1).
- Rahman, Nansy. 2020. Peran Aktif Indonesia Pada Masa Perang Dingin Sejarah Kelas XII. Modul Pembelajaran SMA. Kemendikbud.
- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Trianjani, Suci Dara Aulia Yuman<sup>2</sup>, Arta Nanda Kamila<sup>3</sup>, Yasinta Diva Negara<sup>4</sup>, Syakira Nazla Rifat Junaedi<sup>5</sup>, Farah Fasya<sup>6</sup>, K. D. C., & Muhammad Fairuz<sup>8</sup>, Muhammad Rasyid Fasya Rizkiyansyah, A. R. P. (2016). *Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan Internasional Suci*. 11, 1–23.
- Wijayanti, Anita. 2022. PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF.
- KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies.  
Wuryanto, D. D. (2017). Indonesia Sebagai Tuan Rumah KTT Gerakan Non-Blok X Tahun 1992. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(2): 289-287.